



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Ana Maulidiyah^a, Rohmatul Nurul Ummyah^b, Nuris Salwa^c, Uswatul Ula^d,
Mohammad Djasuli^e

^{a,b,c,d} Jalan Raya Telang, PO BOX 02, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan,
Pulau Madura, Jawa Timur, 69162, Indonesia.

Email: anamaulidiyah4@gmail.com^a, meymeyhasany@gmail.com^b,
nuris.salwa2408@gmail.com^c, uswatulula45@gmail.com^d,
djasuli@trunojoyo.ac.id^e

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 22-04-2026

Revised 09-05-2026

Accepted 12-05-2026

Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal,
Kemandirian
Keuangan Daerah,
Otonomi Daerah,
*Systematic Literature
Review*, Indonesia.

Keywords:

*Fiscal Decentralization,
Regional Financial
Independence, Regional
Autonomy, Systematic
Literature Review,
Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran desentralisasi fiskal sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menganalisis 23 artikel ilmiah yang relevan dalam kurun waktu 2014–2024 untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait perkembangan kajian di bidang tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun desentralisasi fiskal telah memberi daerah lebih banyak wewenang untuk mengelola keuangan, tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan, meskipun sebagian besar daerah belum memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, dan kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, desentralisasi fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dengan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan, pendekatan yang lebih efisien diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study examines the role of fiscal decentralization as a crucial instrument in supporting the implementation of regional autonomy and enhancing the financial independence of local governments in Indonesia. Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this study analyzed 23 relevant scientific articles from 2014–2024 to gain a comprehensive understanding of the development of research in this field. The analysis shows that, although fiscal decentralization has given regions greater authority to manage their finances, the level of regional fiscal independence remains relatively low. This is demonstrated by the fact that local governments are highly dependent on transfer funds from the central government, such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH). Meanwhile, Regional Original Revenue (PAD) is considered a crucial factor in enhancing financial independence, although most regions have not utilized it

effectively. Furthermore, depending on the region's fiscal capacity, governance quality, and ability to harness local economic potential, fiscal decentralization can have varying impacts on economic growth and regional independence. Therefore, to achieve sustainable fiscal independence, a more efficient approach is needed to improve the performance of regional financial management.

@2026 Ana Maulidiyah, Rohmatul Nurul Ummiyah, Nuris Salwa, Uswatul Ula, Mohammad Djasuli

Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan rasio efektivitas dalam pendistribusian sumber daya, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Topik ini penting untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri serta menyediakan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat (Woestho et al., 2020).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal berkembang signifikan sejak reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014, yang secara bertahap memperluas kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suprianik, 2023).

Namun dalam praktiknya, mayoritas daerah masih sangat bergantung pada DAU, DAK, dan DBH, sementara peran PAD belum optimal (Putra & Hidayat, 2016; Fitrianti et al., 2025). Literatur empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten: desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sebagian daerah namun juga memperparah ketergantungan di daerah lain, sehingga kajian sistematis untuk periode 2014–2024 masih sangat diperlukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mensintesis temuan empiris mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan kemandirian keuangan daerah di Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebagai dasar pengembangan studi selanjutnya. Novelty penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang komprehensif dan mutakhir, yakni meliputi 23 artikel ilmiah dari periode 2014–2024, serta mengintegrasikan tiga dimensi kajian secara simultan—yaitu kondisi kemandirian keuangan daerah, faktor-faktor penentunya, dan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi—yang belum dilakukan secara terpadu dalam studi-studi sebelumnya (Zulkarnaini et al., 2024; Hendana et al., 2025; Pabayo, 2025). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu aspek atau wilayah tertentu, penelitian ini menyajikan peta temuan yang lebih menyeluruh dengan menggunakan protokol PRISMA sebagai

kerangka seleksi literatur yang sistematis dan dapat direplikasi.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah dari berbagai sudut pandang. Zulkarnaini et al. (2024) melakukan *systematic literature review* tentang implementasi desentralisasi fiskal namun dengan cakupan multi-aspek yang lebih luas tanpa fokus khusus pada kemandirian keuangan. Pabayo (2025) mengkaji dampak kebijakan desentralisasi terhadap kemandirian fiskal daerah, tetapi terbatas pada 30 studi dan tidak menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Hendana et al. (2025) mengkaji desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak secara mendalam membahas faktor-faktor penentu kemandirian. Yang membedakan penelitian ini adalah penggabungan ketiga dimensi—kondisi kemandirian, faktor determinan, dan dampak pertumbuhan ekonomi—dalam satu kajian sistematis berbasis protokol PRISMA dengan cakupan literatur 2014–2024 yang lebih mutakhir dan komprehensif.

Penelitian oleh Arifin & Rosalia (2025) menemukan kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Timur hanya sekitar 8% dengan ketergantungan transfer pusat hampir 90%. Pabayo (2025) melalui kajian 30 studi di Indonesia menyimpulkan desentralisasi fiskal menghasilkan efek tidak konsisten—sebagian daerah meningkatkan kewenangannya, sebagian lain justru mengalami peningkatan ketergantungan.

Hasanah et al. (2025) membuktikan seluruh komponen PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah, menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan kunci utama mengurangi ketergantungan transfer pusat. Huda et al. (2022) mengonfirmasi tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia secara umum masih rendah.

Studi di berbagai daerah menunjukkan gambaran serupa: Nalle et al. (2021) di NTT mencatat rasio ketergantungan yang sangat tinggi; Wulandari et al. (2023) di Kota Mataram menemukan kemandirian pada kategori rendah hingga sedang; Woestho et al. (2020) di Jeneponto mendapati kemandirian hanya 0% – 25%; dan Ullo et al. (2023) di Manokwari mencatat rata-rata kemandirian 8,71% dengan DDF hanya 7,25%.

Terkait dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, Suprianik (2023) menemukan hasil yang bervariasi antar daerah – desentralisasi fiskal berpengaruh positif di sebagian daerah namun negative di daerah lain, bergantung pada kapasitas

fiskal dan kualitas tata kelola pemerintah daerah masing-masing.

Kajian Teoritis

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pengalihan kewenangan manajerial dan finansial dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, mencakup tiga dimensi: (1) desentralisasi pendapatan, yakni kewenangan memobilisasi sumber daya melalui pajak dan retribusi; (2) desentralisasi pengeluaran, yakni kewenangan menentukan alokasi belanja sesuai prioritas daerah; dan (3) desentralisasi pembiayaan, yakni kewenangan mengelola sumber pembiayaan termasuk pinjaman daerah. Konsep ini berakar pada teori Oates (1972) tentang keunggulan informasi pemerintah lokal yang memungkinkan alokasi sumber daya lebih efisien, serta teori Tiebout (1956) yang mendorong kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi otonomi pengelolaan keuangan kepada daerah sambil mempertahankan mekanisme transfer fiskal untuk mengurangi ketimpangan antardaerah (Kusuma, 2013). Kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio PAD terhadap total penerimaan, dengan klasifikasi: tinggi ($>75\%$), sedang ($50\%–75\%$), rendah ($25\%–50\%$), dan sangat rendah ($<25\%$). Mayoritas daerah di Indonesia masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah karena struktur fiskal didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara teoritis, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi katalisator penguatan otonomi finansial daerah dengan mendorong optimalisasi PAD dan peningkatan efektivitas tata kelola anggaran. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD sendiri, sehingga daerah cenderung lebih bergantung pada transfer daripada berupaya meningkatkan PAD. Fenomena ini menunjukkan kontradiksi antara teori dan praktik: desentralisasi fiskal justru dapat memperkuat ketergantungan pada pusat. Keberhasilan desentralisasi juga dipengaruhi ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah – daerah dengan potensi ekonomi tinggi cenderung lebih mandiri, sementara daerah berkapasitas rendah tetap bergantung pada transfer pusat (Zulkarnaini et al., 2024). Kontradiksi inilah yang menjadi dasar dilakukannya Systematic Literature Review guna memahami secara komprehensif pengaruh desentralisasi fiskal mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Indonesia, khususnya dalam periode 2014–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Proses SLR mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta Analyses*) untuk meningkatkan kualitas dan hasil tinjauan literatur.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data utama, yakni Google Scholar dan Sinta yang ditelusuri mulai dari tahun 2014-2024, untuk memastikan bahwa penelitian yang diteliti mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang yang akan dibahas. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “desentralisasi fiskal”, “kemandirian keuangan daerah”, “pendapatan asli daerah”, “*flypaper effect Indonesia*”, “*fiscal decentralization Indonesia*”, dan kombinasinya dengan operator Boolean AND/OR.

Penelitian ini menetapkan sejumlah kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal bertaraf internasional, (2) penelitian yang secara langsung membahas desentralisasi fiskal dan/atau kemandirian keuangan daerah di Indonesia, (3) penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods, serta (4) artikel yang tersedia dalam versi teks lengkap. Di sisi lain, kriteria eksklusi yang diterapkan meliputi: (1) artikel yang tidak relevan dengan topik, (2) duplikasi publikasi, serta (3) sumber yang bersifat non-ilmiah seperti blog atau website populer.

Melalui proses seleksi yang telah dilakukan, diperoleh sebanyak 23 artikel yang dinyatakan memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut. Pada tahap akhir yakni tahap sintesis, dilakukan dengan mengelompokkan dan menganalisis temuan penelitian ke dalam beberapa tema utama, diantaranya tingkat kemandirian keuangan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian sistematis terhadap literatur yang terkumpul dengan berdasarkan proses seleksi sistematis menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh sebanyak 23 artikel untuk dianalisis lebih lanjut. Berfokus pada konteks Indonesia, dan secara substansial membahas desentralisasi fiskal dan/atau kemandirian keuangan daerah.

Kondisi Kemandirian Keuangan dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Temuan dari 8 artikel yang secara langsung mengukur kemandirian keuangan

daerah dan derajat desentralisasi fiskal (DDF) menggambarkan kondisi yang secara umum masih rendah di berbagai wilayah Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa (Huda et al., 2022; Syam & Zulfikar, 2022; Ullo et al., 2023; Syahputra, 2017; Melmambessy, 2022; Wulandari et al., 2023; Nalle et al., 2021; Woestho et al., 2020). Studi komprehensif yang mengkaji kinerja keuangan pemerintah kota di Indonesia periode 2019-2021 menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan berada dalam kategori rendah, rasio ketergantungan keuangan sangat tinggi, dan rasio desentralisasi fiskal masuk kategori kurang (Huda et al., 2022).

Kondisi serupa ditemukan di berbagai daerah lain: Kabupaten kaimana mencatat rata-rata rasio kemandirian hanya 3,82% dengan ketergantungan fiskal 95,67% (Syam & Zulfikar, 2022), Kabupaten Manokwari dengan rata-rata kemandirian 8,71% dan DDF 7,25% (Ullo et al., 2023), serta Kabupaten Aceh Tamiang dengan DDF hanya 4,46% - 6,96%, yang berarti lebih dari 90% pembiayaan berasal dari transfer pusat (Syahputra, 2017). Di Kota Jayapura, ketergantungan fiskal rata-rata mencapai 83,10% meskipun kemandirian fiskalnya mencapai 23,14% (Melmambessy, 2022), sementara Kota Mataram menunjukkan rasio kemandirian pada kategori konsultatif di rentang 25% - 50% meski DDF-nya masih sangat rendah (Wulandari et al., 2023).

Provinsi NTT mencatat DDF rata-rata 24,83% dengan rasio ketergantungan tetap sangat tinggi yaitu 62,95% (Nalle et al., 2021), dan Kabupaten Jeneponto menunjukkan rasio kemandirian yang masih berada pada rentang 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif (Woestho et al., 2020). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Sejumlah penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dari sisi komponen pendapatan, transfer pusat, dan karakteristik daerah (Humaira & Widyawati, 2025; Hasanah et al., 2025; Fitrianti et al., 2025; Sabono & Firmansyah, 2024; Somantri, 2024; Utami & Iskandar, 2020). Temuan-temuan ini memberikan pemahaman yang lebih baik terkait mengapa sebagian daerah memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai kemandirian dibandingkan daerah lainnya.

PAD sebagai Penentu Utama Kemandirian

Humaira & Widyawati (2025) menemukan bahwa hanya PAD yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak signifikan. Temuan ini menegaskan

bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi PAD merupakan langkah utama peningkatan kemandirian fiskal, sejalan dengan amanat UU No. 33 Tahun 2004 yang menempatkan PAD sebagai instrumen utama pembiayaan otonomi daerah.

Perdebatan tentang *Flypaper effect*

Isu yang paling banyak diperdebatkan dalam literatur keuangan daerah, salah satunya adalah apakah belanja daerah lebih dipengaruhi oleh PAD atau oleh dana transfer dari pemerintah pusat (Utami & Iskandar, 2020; Somantri, 2024; Fitrianti et al., 2025). Fenomena di mana respon belanja terhadap transfer lebih besar daripada respon terhadap PAD dikenal sebagai *flypaper effect*.

Utami & Iskandar (2020) dengan metode *Two Stage Least Square* pada 34 provinsi (2013–2018) menemukan *flypaper effect* tidak terbukti—efek PAD lebih dominan dari Dana Perimbangan terhadap belanja daerah.

Somantri (2024) sebaliknya mengonfirmasi *flypaper effect* di Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan koefisien DAU lebih besar dari PAD. Fitrianti et al. (2025) menemukan koefisien hibah tanpa syarat ($\beta=0,501$) melebihi PAD ($\beta=0,366$), disertai disparitas regional: Sulawesi Selatan lebih mandiri, sedangkan Sulawesi Tenggara dan Utara paling bergantung pada transfer pusat.

Faktor Non-Fiskal: Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah

Sabono & Firmansyah (2024) menemukan bahwa infrastruktur pariwisata dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian di Provinsi Maluku, sementara infrastruktur perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif. Temuan ini menunjukkan tidak semua belanja infrastruktur secara otomatis meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Beberapa studi menyelidiki hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah (Ginting et al., 2019; Suprianik, 2023; Utomo & Tambunan, 2024; Kusuma, 2016; Yuvanda et al., 2025; Putra & Hidayat, 2016; Adipura et al., 2022; Hendana et al., 2025). Hasil yang didapat beragam, menunjukkan kompleksitas hubungan yang dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing daerah.

Pengaruh Positif Signifikan

Beberapa studi menemukan bukti adanya pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah Studi yang dilakukan oleh Ginting et al., (2019) yang mengungkapkan bahwa DDF berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan di semua klaster wilayah. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa rata-rata sebesar 86,7% kabupaten dan kota berapa pada

kuadran IV yang mengindikasikan rendahnya desentralisasi fiskal dan rendahnya pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan peningkatan belanja modal secara signifikan. Sementara itu, studi di Jawa Tengah oleh Utomo & Tambunan, (2024) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi terbukti secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dengan catatan bahwa pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang baik menjadi prasyarat utamanya. Di sisi lain, Kusuma, (2016) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal yang dipresentasikan melalui rasio belanja modal dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan terbukti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil yang Tidak Konsisten

Di sisi lain, Suprianik (2023) menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif di sebagian daerah namun negatif di daerah lain. Yuvanda et al. (2025) menemukan DDF yang sangat rendah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi, dan Putra & Hidayat (2016) mengonfirmasi tidak ada hubungan signifikan antara rasio kemandirian keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Jalur Tidak Langsung melalui IPM dan Efektivitas

Adipura et al. (2022) di Provinsi Jambi menemukan bahwa DDF, kemandirian keuangan, dan efektivitas berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi, namun ketika dimediasi IPM, hanya kemandirian dan efektivitas yang berpengaruh. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal perlu didukung peningkatan kualitas SDM agar dampak pertumbuhannya lebih optimal.

Kondisionalitas Dampak

Hendana et al. (2025) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal efektif apabila didukung kapasitas kelembagaan yang memadai, manajemen keuangan efisien, serta alokasi anggaran tepat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di daerah dengan tata kelola lemah, pelimpahan kewenangan fiskal tidak menunjukkan hasil signifikan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kondisi lokal, termasuk kualitas kelembagaan dan struktur ekonomi.

Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampak Sosial: Pengangguran dan Kemiskinan

Febiandani & Suseno (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berkorelasi negatif dengan pengangguran dan kemiskinan—semakin mandiri suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan dan penganggurannya. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan fiskal merupakan investasi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, melampaui aspek anggaran semata.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kajian sistematis terhadap 23 artikel ilmiah periode 2014–2024 menghasilkan tiga simpulan utama sebagai berikut.

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia secara umum masih berada dalam kategori rendah hingga sangat rendah. Hampir seluruh daerah yang dikaji menunjukkan rasio ketergantungan terhadap transfer pusat yang jauh lebih besar dibanding kontribusi PAD (Huda et al., 2022; Ullo et al., 2023; Nalle et al., 2021; Woestho et al., 2020).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penentu utama kemandirian fiskal daerah, sementara variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak terbukti berpengaruh signifikan secara langsung (Humaira & Widyawati, 2025; Hasanah et al., 2025). Terkait *flypaper effect*, temuan antar studi bersifat tidak konsisten dan kontekstual, dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas tata kelola, dan struktur fiskal masing-masing daerah (Utami & Iskandar, 2020; Somantri, 2024; Fitrianti et al., 2025).
3. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kondisi lokal. Studi-studi menemukan pengaruh positif, negatif, maupun tidak signifikan, tergantung pada kualitas kelembagaan dan efisiensi belanja daerah (Supriani, 2023; Ginting et al., 2019; Hendana et al., 2025). Selain itu, peningkatan kemandirian keuangan daerah terbukti berkorelasi dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan, sehingga kebijakan ini memiliki relevansi yang melampaui aspek fiskal semata (Febiandani & Suseno, 2016).

Keterbatasan

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelusuran literatur yang hanya melalui Google Scholar dan Sinta berpotensi menimbulkan bias publikasi. Kedua, sebagian besar artikel yang dikaji berfokus pada area tertentu sehingga tidak merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia secara proporsional. Ketiga, heterogenitas metode antar artikel menyulitkan perbandingan temuan secara langsung.

Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, diajukan beberapa saran. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sumber basis data pencarian ke jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science) agar bias publikasi dapat diminimalkan. Ketiga, disarankan pula untuk

melakukan studi komparatif antar daerah dengan karakteristik yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipura, I. S., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2022). Effectiveness And Efficiency On Economic Growth and Human. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 82–92.
- Febiandani, R., & Suseno, D. A. (2016). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217–225.
- Fitrianti, R., Sanusi, M. Z., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). *Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia*. *Public and Municipal Finance*, 14(1). [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 152–160. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art3>
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 197–210.
- Hendana, D., Indrayani, L., Anggraini, A., Daniyal, D., & Amelia, W. R. (2025). Fiscal Decentralization on Economic Growth (A Systematic Literature Review). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 32–52.
- Huda, N., Mus, A. R., & Tjan, J. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota di Indonesia. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(2), 1–15.
- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(3), 1–18.
- Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11.

- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal INOVASI*, 17(1), 184–197.
- Pabayo, A. S. T. (2025). *The impact of fiscal decentralization policy on regional fiscal independence in Indonesia*. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). *Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku*. 8, 2677–2685.
- Somantri, A. D. (2024). Analisis *Flypaper effect* dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 652–665.
- Suprianik. (2023). Analysis of The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia. *Al-Manhaj (Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam)*, 5(1), 433–442. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2109>
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
- Ullo, F., Kakisinaki, C. S., & Hartati, Y. S. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah di kabupaten manokwari. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 54–60.
- Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). *Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square)*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 44–59.
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. K. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 182–191.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal RISMA*, 3(2), 56–69.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Herlin, F. (2025). Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah: Studi Empiris Kabupaten / Kota Di Provinsi Jambi. *14(02)*, 525–532.
- Zulkarnaini, Islahuddin, Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic Literature Review: Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4).